BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terstruktur. Di era reformasi, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau stakeholder, terutama transparansi kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Laporan keuangan yang berkualitas sudah menjadi hal penting sebagai pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi harta,utang,dan modal yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Organisasi sektor publik di indonesia dalam pratiknya saat ini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh auditor independen, didistribusikan kepada DPRD, dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang telah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya (Mahmudi, 2007:27). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat (Arens, 2008: 57). Kriteria pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan (adequate disclousure), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaiu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Selain itu, dengan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tahun 2013 BPKP secara konsisten melaksanakan pengawasan terhadap program/ keahlian lintas sektoral, kebendaharaan umum negara/daerah dan kegiatan pengawasan lainnya atas penugasan presiden. BPKP secara rutin juga melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di berbagai wilayah provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus senantiasa diawasi dan dikendalikan baik secara internal maupun eksternal, sehingga kualitas LKPD akan semakin terjamin. Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keuangan daerah secara internal, masing-masing daerah termasuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang terkait akan didampingi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertindak sebagai auditor internal pemerintah. Peran auditor internal menjadi

faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Auditor internal memiliki peran dan posisi strategis serta dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai early warning system, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di instansi terkait sebelum pihak lain mengetahui. Sistem Pengendalian Intern (SPI) mendapat perhatian yang cukup besar belakangan ini dari BPK selaku auditor eksternal selalu menguji kekuatan SPI di setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan luas lingkup pengujian yang dilaksanakannya. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Fenomena menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang telah meraih lima kali berturut–turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga Pemerintah Kota Palembang tercepat kedua dalam mengumpulkan laporan keuangan (djpb.kemenkeu.go.id). Hal ini dapat diartikan bahwa dari hasil data tersebut kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang sangat baik dan transparan sehingga pemerintah kota palembang sudah meningkatkan laporan keuangannya sehingga berhasil meraih WTP. Perkembangan LKPD tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan LKPD Kota Palembang

Tahun Anggaran	Opini yang diperoleh dari BPK
2014	Wajar Tanpa pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa PEngecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2014-2018

Berdasarkaan tabel di atas dapat dilihat opini BPK terhadap LKPD Kota Palembang mengalami peningkatan sejak tahun 2014 sampai 2018. LKPD Kota Palembang mendapat Opini WTP, tentunya mendapat opini WTP selama 5 tahun berturut-turut merupakan suatu prestasi bagi pemerintah kota Palembang. Apalagi setelah diterapkannya SAP pada tahun 2015,kualitas LKPD semakin meningkat. Kemudian hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti peran auditor

internal adalah terdapat kasus di BPKAD Kota Palembang dimana dua orang oknum pegawainya ditetapkan oleh Jasa Penuntut Umum (JPU) sebagai tersangka pada tahun 2016 terkait dengan kasus korupsi sebesar 310 juta atas penyimpangan dana pengadaan lift di BPKAD di Kota Palembang sebagaimana dilansir dalam situs Detik News. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat dikatakan bahwa peran auditor internal yang dijalankan masih belum maksimal. Maka, kompetensi aparatur yakni sumber daya manusia belum secara maksimal dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dapat meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang sehingga laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang bisa mendapat opini WTP.

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai, jika tidak didukung dengan teknologi informasi belum tentu dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal. Agar menunjang laporan keuangan andal, akuntabel, dan transparan maka diperlukan suatu Teknologi Informasi untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien dan ekonomis berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan uraitan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Determinasi Variabel Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang?
2. Apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang?
3. Apakah ada pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkar Daerah di Kota Palembang?
4. Apakah ada pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang?
5. Apakah ada pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam proposal penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dan peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya pada Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal berpengaruh secara bersama-sama Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkar Daerah di Kota Palembang
4. Untuk mengetahui pengaruh Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang
5. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang secara simultan

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat secara teoritis

1. Mengembangkan dan pengukuran pada variabel Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya yang memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di kota palembang

1.4.2.2 Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

menambah refrensi sehingga Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang terpacu untuk terus menerus meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kota Palembang guna tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan.